School Review sebagai Upaya Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 12 Makassar

Nur Raudha Tul Munawara*[1], Astuti[2], Liza Dwi Eftiza Khairunniza[3], Supriadi Torro[4]
Universitas Negeri Makassar[1,2,3,4]
e-mail: raudharaudha500@gmail.com*[1], tuti90941@gmail.com[2], Lizadwi.eftiza@unm.ac.id[3], supriaditorro@unm.ac.id[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan *school review* sebagai sarana evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 12 Makassar. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara semiterstruktur dengan kepala sekolah pada 30 September 2026. Data ditelaah dengan memilah informasi, mengelompokkan tema, dan merumuskan simpulan berdasarkan keterangan informan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan evaluatif dijalankan melalui supervisi internal oleh kepala sekolah dan supervisi eksternal oleh pengawas. Pemeriksaan terutama mencakup administrasi sekolah, perangkat pembelajaran, serta praktik mengajar. Temuan supervisi dibicarakan dalam rapat kerja tahunan untuk menentukan program perbaikan yang melibatkan guru, tenaga kependidikan, komite, orang tua, dan yayasan. Kendala paling menonjol berkaitan dengan keterbatasan pembiayaan, kekakuan penggunaan dana operasional, serta tertundanya dukungan anggaran daerah. Indikator keberhasilan masih bertumpu pada kinerja pendidik dan prestasi peserta didik, sedangkan penilaian proses belum tergambarkan secara menyeluruh. Pelaksanaan evaluasi telah menyediakan dasar pengambilan keputusan, tetapi belum identik dengan evaluasi diri sekolah yang komprehensif. Penguatan indikator pembelajaran, dokumentasi tindak lanjut, partisipasi warga sekolah, dan kepastian pendanaan diperlukan untuk mendukung perbaikan mutu yang terarah serta berkelanjutan. Penelitian ini memperlihatkan kaitan antara praktik supervisi yang berjalan dengan kebutuhan penjaminan mutu sekolah.

Kata kunci : Evaluasi Diri Sekolah; Mutu Pendidikan; Penjaminan Mutu; *School Review*; Supervisi Sekolah.

ABSTRACT

This study describes the implementation of school review as an approach to evaluating and improving educational quality at SMP Muhammadiyah 12 Makassar. A descriptive qualitative design was employed, using a semistructured interview with the school principal on September 30, 2026. Information was organized into themes and interpreted to identify evaluation practices, follow-up measures, and constraints. Findings indicate that evaluation is undertaken through internal supervision by the principal and external supervision by school inspectors. Assessment primarily addresses administrative compliance, teaching documents, and classroom practices. Supervisory findings inform annual planning meetings attended by teachers, staff, school committee representatives, parents, and the foundation. Financial limitations, restrictive operational funding arrangements, and delayed local funding constitute prominent obstacles. Success is assessed mainly through teacher performance and students' academic and extracurricular achievements, whereas systematic examination of learning processes remains less apparent. Existing supervision therefore supports school decisions but does not fully represent comprehensive, participatory self-evaluation. Strengthening process indicators, documenting follow-up actions, broadening stakeholder involvement, and ensuring predictable financing could make improvement planning more evidence-informed, accountable, and sustainable. Findings reflect the principal's account and warrant caution.

Keywords **:** *Educational Quality; Quality Assurance; School Review; School Self-Evaluation; School Supervision.*

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan tidak dapat direduksi menjadi perolehan nilai peserta didik atau kelengkapan dokumen kelembagaan. Mutu suatu satuan pendidikan berkaitan dengan keterhubungan antara pengelolaan sumber daya, pengalaman belajar, kinerja pendidik, dan capaian yang dihasilkan. Karena itu, upaya pengembangan sekolah memerlukan informasi mengenai apa yang sudah berjalan, bagian yang belum memenuhi kebutuhan, serta penyebab kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Kerangka Standar Nasional Pendidikan memberikan rujukan bagi penyelenggaraan layanan pendidikan, sedangkan pengaturan penjaminan mutu menegaskan perlunya proses evaluasi dan pembenahan secara berkesinambungan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan). Evaluasi yang dilaksanakan sekolah menjadi penting bukan sekadar sebagai bukti kepatuhan, melainkan sebagai pijakan menentukan keputusan yang berkaitan langsung dengan kualitas layanan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *school review*, yakni penelaahan reflektif terhadap kondisi dan kinerja sekolah untuk mengenali keunggulan, keterbatasan, serta kebutuhan pembaruan. Dalam pemikiran MacBeath (1999), sekolah perlu mempunyai kemampuan menilai dirinya melalui bukti yang dikumpulkan dan dipahami bersama. Penilaian demikian tidak berhenti pada pemeriksaan perangkat administratif, sebab kualitas sekolah juga dibentuk oleh proses pengajaran, iklim pembelajaran, kepemimpinan, dan hubungan dengan masyarakat. Kebijakan penjaminan mutu di Indonesia telah lama menempatkan kegiatan evaluatif sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan). Dengan demikian, *school review* berpotensi menjadi ruang dialog antara data sekolah, pengalaman warga sekolah, dan agenda perbaikan yang dapat dijalankan.

Praktik supervisi memiliki kedekatan dengan *school review*, tetapi kedua istilah tersebut tidak dapat digunakan sebagai padanan yang sepenuhnya sama. Supervisi akademik biasanya memberi perhatian pada perangkat dan praktik pembelajaran, sedangkan supervisi manajerial menelaah pengelolaan sekolah. *School review* mempunyai jangkauan lebih luas karena menempatkan aneka informasi dari kedua kegiatan itu ke dalam evaluasi kelembagaan yang terintegrasi. Kajian Dewi (2020) menemukan bahwa supervisi yang terlalu terpusat pada kelengkapan administrasi dapat mengurangi peluang pembinaan keterampilan mengajar. Sebaliknya, Kurniawan et al. (2018) memperlihatkan pentingnya hubungan antara kebutuhan program, pelaksanaan, dan tindak lanjut saat menilai supervisi akademik. Kedua temuan ini memberikan landasan untuk membaca apakah kegiatan pengawasan hanya berakhir sebagai pemeriksaan atau benar-benar menjadi sarana perubahan.

Efektivitas evaluasi juga ditentukan oleh cara sekolah menggunakan temuannya. Program yang dilaksanakan tanpa penelaahan hasil akan sulit dibedakan dari kegiatan rutin yang tidak memiliki arah pembaruan yang jelas. Meirani et al. (2022) menunjukkan bahwa persoalan dalam sistem penjaminan mutu internal dapat berhubungan dengan kurikulum, sarana, dan relasi sekolah dengan masyarakat. Sementara itu, Nasikhah et al. (2024) menekankan hubungan antara penjaminan mutu, integritas pengelolaan, dan kepercayaan publik. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa penilaian atas sekolah perlu dikaitkan dengan tindakan yang bisa dipantau, bukan hanya pengisian instrumen. Kegiatan evaluasi akan memiliki nilai praktis ketika hasilnya diterjemahkan menjadi prioritas, penanggung jawab, sumber daya, serta cara memeriksa perkembangan perbaikan.

Kepemimpinan kepala sekolah menjadi unsur penting dalam proses ini. Pimpinan satuan pendidikan bukan sekadar penerima laporan supervisi, melainkan pihak yang memaknai hasil pengawasan, mempertemukan pandangan warga sekolah, dan mengoordinasikan tindak lanjutnya. Penelitian Bunbaban et al. (2022) menghubungkan kepemimpinan transformasional dengan pembaruan kualitas sekolah melalui evaluasi program. Pratiwi et al. (2023) memperlihatkan pentingnya memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi akademik, sedangkan Sopacuaperu et al. (2025) menyoroti upaya pengembangan kompetensi guru sesudah supervisi dilakukan. Rangkaian temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas penilaian sekolah tidak cukup dilihat dari frekuensi kunjungan pengawas; keberhasilannya juga ditentukan oleh pemanfaatan informasi sebagai dasar pembinaan.

Di sisi lain, penjaminan mutu menuntut partisipasi yang melampaui hubungan antara kepala sekolah dan guru. Komite sekolah, orang tua, tenaga kependidikan, dan yayasan memiliki pengalaman serta kepentingan

yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan. Hardiansyah (2022) mengemukakan bahwa manajemen berbasis sekolah memberi peluang bagi keterlibatan komite dan orang tua dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Kajian Islahuddin et al. (2024) juga memperlihatkan kontribusi masyarakat setempat terhadap pengelolaan lembaga pendidikan berbasis keagamaan, antara lain melalui dukungan sumber daya dan sarana. Dalam konteks sekolah swasta, forum yang membuka ruang musyawarah antarpihak tersebut menjadi relevan untuk mempertemukan kebutuhan pendidikan dengan kapasitas pembiayaannya.

Penelitian sebelumnya mengenai evaluasi diri sekolah memberikan gambaran tentang manfaat dan kendala implementasinya. Alamsyah (2015) menjelaskan hubungan evaluasi diri dengan kinerja guru serta mutu pembelajaran, khususnya ketika penilaian disertai upaya peningkatan kapasitas pendidik. Khoiroh (2019) menunjukkan penggunaan instrumen evaluasi diri yang berpijak pada standar pendidikan dan melibatkan unsur sekolah, tetapi tindak lanjutnya menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan. Keduanya memperlihatkan bahwa pemetaan kondisi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan layanan. Sekolah memerlukan kesanggupan mengubah hasil evaluasi menjadi kegiatan yang realistis dan relevan. Perbedaan lingkungan kelembagaan, termasuk status swasta, pola pendanaan, dan dukungan masyarakat, juga dapat membentuk ragam kendala yang dihadapi.

Keterbatasan pembiayaan merupakan persoalan yang tidak terpisahkan dari agenda mutu. Sekolah dapat memiliki daftar kebutuhan yang jelas, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kemampuan membiayai sarana, pemeliharaan, dan pemenuhan kewajiban terhadap pendidik. Kramer dan Wibowo (2024) menemukan kesulitan pengembangan program ketika dana bantuan operasional menjadi sumber pemasukan utama sekolah dengan kemampuan anggaran terbatas. Pantas dan Fitriana (2024) menekankan perlunya menilai pembiayaan pendidikan dari efektivitas dan dampaknya, bukan semata besarnya alokasi. Oleh sebab itu, diskusi mengenai *school review* perlu memperhatikan keterkaitan antara informasi hasil evaluasi, penyusunan prioritas, dan kelayakan sumber daya untuk menjalankan perbaikan yang dipilih.

SMP Muhammadiyah 12 Makassar menjadi konteks yang penting untuk menelaah pertautan tersebut. Berdasarkan keterangan pimpinan sekolah, kegiatan evaluasi telah dilakukan melalui supervisi internal dan eksternal. Hasilnya tidak hanya berhubungan dengan administrasi dan kinerja pengajaran, tetapi juga dipertimbangkan dalam rapat kerja, pelibatan komite serta yayasan, dan pembahasan kebutuhan fasilitas. Pada saat yang sama, sekolah menghadapi keterbatasan anggaran yang memengaruhi penyelenggaraan layanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya menguraikan praktik evaluasi yang benar-benar berjalan, bagaimana hasilnya digunakan, serta mengapa sebagian kebutuhan perbaikan belum mudah dipenuhi. Penyebutan *school review* dalam kajian ini digunakan sebagai kerangka analitis, sementara istilah supervisi dipertahankan ketika merujuk pada praktik yang dikemukakan informan.

Dari sisi pengembangan pengetahuan, kajian ini diarahkan untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai hubungan antara pengawasan, perencanaan program, partisipasi pemangku kepentingan, dan hambatan peningkatan mutu pada satu sekolah menengah pertama swasta. Perhatian tidak hanya ditujukan pada adanya perangkat evaluasi, tetapi juga pada pengalaman pimpinan sekolah dalam menafsirkan temuan dan menentukan tindak lanjutnya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman serta bentuk pelaksanaan *school review*, aspek yang diperiksa, pemanfaatan hasil, pihak yang dilibatkan, kendala penyelenggaraan, dan indikator keberhasilan yang digunakan di SMP Muhammadiyah 12 Makassar. Pembacaan tersebut diharapkan memberi dasar bagi penguatan evaluasi diri yang lebih terintegrasi tanpa mengabaikan kenyataan sumber daya yang dimiliki sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik evaluasi sekolah melalui keterangan pelaku yang terlibat dalam pengelolaannya. Lokasi kajian adalah SMP Muhammadiyah 12 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kegiatan wawancara pada 30 September 2026. Pemilihan lokasi terkait dengan fokus kajian mengenai supervisi dan upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan swasta. Pendekatan ini memungkinkan penguraian proses, pemaknaan, dan kendala sesuai konteks yang dijelaskan informan, tanpa dimaksudkan untuk memperkirakan hubungan sebab akibat secara statistik (Creswell, 2014).

Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah yang dipilih secara purposif karena keterlibatannya dalam pengawasan internal, pengelolaan program, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Pengumpulan data menggunakan wawancara semiterstruktur secara tatap muka dengan pedoman yang mencakup bentuk supervisi, cakupan penilaian, tindak lanjut, partisipasi pemangku kepentingan, hambatan anggaran, dan ukuran keberhasilan. Keterangan mengenai guru, komite, orang tua, dan yayasan diperlakukan sebagai uraian kepala sekolah tentang pelibatan mereka dalam kegiatan sekolah, bukan sebagai hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak tersebut.

Pengolahan informasi mengacu pada langkah pemilahan data, penyajian tematik, dan perumusan kesimpulan secara berulang sebagaimana dijelaskan Miles et al. (2014). Pokok jawaban dikelompokkan menjadi enam tema yang mempertahankan urutan persoalan penelitian, lalu ditelaah kesesuaiannya dengan penjelasan dalam wawancara. Penafsiran dibatasi pada perspektif kepala sekolah dan dilakukan dengan membedakan pernyataan tentang praktik yang telah berlangsung dari rekomendasi yang diturunkan melalui pembacaan teori. Pemeriksaan konsistensi antartema serta konfirmasi ringkasan informasi kepada informan digunakan sebagai langkah menjaga ketepatan penafsiran (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

Dengan satu informan utama, penelitian ini tidak mengklaim telah melakukan triangulasi sumber antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Keterangan yang berkaitan dengan besaran dana, jumlah bantuan, dan prestasi peserta didik disajikan sebagai informasi yang disampaikan informan, bukan hasil audit keuangan atau pengukuran prestasi secara mandiri. Pembatasan ini menjaga kesesuaian antara cakupan data, analisis, dan tingkat kesimpulan, sekaligus menunjukkan kebutuhan akan pengayaan sumber pada penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Wawancara berlangsung di lingkungan sekolah dengan kepala sekolah sebagai informan kunci. Gambar 1 memperlihatkan pertemuan peneliti dan informan sebelum wawancara, sedangkan Gambar 2 mendokumentasikan proses penggalian informasi secara tatap muka. Kedua foto memberikan konteks pelaksanaan pengumpulan data dan tidak dipergunakan sebagai bukti untuk menilai besarnya peningkatan mutu. Uraian hasil dikelompokkan dalam enam tema sesuai cakupan wawancara. Ringkasan keseluruhannya disajikan dalam Tabel 1 setelah pemaparan tematik.



Gambar 1. Peneliti bersama informan sebelum wawancara dilaksanakan



Gambar 2. Proses wawancara dengan informan di ruang sekolah

1. Pemahaman dan Bentuk Pelaksanaan School Review

Kepala sekolah menerangkan bahwa kegiatan pemeriksaan dan penilaian sekolah telah menjadi bagian dari rutinitas pengelolaan. Praktik tersebut lazim disebut supervisi, bukan *school review*. Ketika kegiatan dilaksanakan oleh pimpinan sekolah, istilah yang digunakan adalah supervisi internal; sementara pemeriksaan oleh pengawas dari luar sekolah dipahami sebagai supervisi eksternal. Informan tidak langsung menghubungkan kedua kegiatan itu dengan istilah *school review*, tetapi menggambarkan aktivitas yang mempunyai tujuan evaluatif, khususnya untuk mengetahui kelengkapan administrasi sekolah serta perangkat kerja guru. Hal ini menunjukkan adanya praktik pengawasan yang dikenali secara operasional walaupun istilah evaluasi diri belum menjadi bahasa utama pengelolaan sekolah.

Dalam penjelasan informan, kegiatan supervisi berlangsung berulang sesuai kebutuhan dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Penilaian diarahkan pada aspek yang dapat diperiksa melalui perangkat atau pengamatan ketika pengawas datang. Kepala sekolah diposisikan sebagai penanggung jawab pemeriksaan internal, sedangkan pengawas eksternal melakukan penilaian dari luar satuan pendidikan. Informan belum menguraikan mekanisme evaluasi diri terpadu yang secara khusus menyatukan seluruh ukuran mutu, perolehan data antarperiode, dan keterlibatan sistematis setiap kelompok pemangku kepentingan. Oleh karena itu, bentuk yang dapat diidentifikasi secara langsung adalah supervisi sebagai praktik evaluasi yang tersedia di sekolah.

2. Aspek yang Dinilai dan Pihak yang Terlibat

Penilaian manajerial terutama diarahkan pada kepatuhan administrasi, termasuk kewajiban laporan kepada dinas, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan penyampaian rapor pendidikan. Pada ranah pembelajaran, perhatian diberikan kepada ketersediaan modul ajar dan cara guru melaksanakan pengajaran. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa aspek sekolah yang dinilai terbagi antara tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan tugas pedagogis. Pemeriksaan administrasi dipandang perlu agar kewajiban pelaporan dapat dipenuhi, sedangkan peninjauan perangkat dan praktik guru digunakan untuk melihat kesiapan serta pelaksanaan pembelajaran.

Informan menyatakan bahwa kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai peran sesuai pembagian tugas masing-masing. Meskipun demikian, wawancara tidak merinci penggunaan indikator khusus mengenai iklim sekolah, kepuasan orang tua, pengalaman peserta didik, atau perkembangan belajar yang ditelusuri dalam rentang waktu tertentu. Hal ini bukan berarti semua aspek tersebut sama sekali tidak dinilai, melainkan belum muncul sebagai bagian yang dijelaskan secara eksplisit oleh informan. Dengan batasan itu, cakupan yang paling jelas teridentifikasi adalah kelengkapan administratif, perangkat pembelajaran, serta pengamatan terhadap kegiatan mengajar.

3. Pemanfaatan Hasil Review dan Tindak Lanjut Perbaikan

Hasil supervisi memuat butir penilaian yang membantu pihak sekolah mengetahui kekurangan pada bagian tertentu. Informasi tersebut dibawa ke rapat kerja tahunan untuk meninjau program yang telah

dikerjakan dan merumuskan kegiatan tahun berikutnya. Kepala sekolah menjelaskan bahwa pembahasan tidak berhenti pada identifikasi masalah. Tindakan perbaikan disampaikan kepada penanggung jawab bidang yang berkaitan, termasuk guru, pengelola sarana dan prasarana, serta petugas laboratorium ilmu pengetahuan alam dan komputer. Mekanisme ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kegiatan pemeriksaan dan penetapan pekerjaan yang perlu dilakukan.

Persoalan fasilitas turut masuk dalam prioritas perbaikan. Peralatan yang rusak menjadi bagian dari tanggung jawab pemeliharaan sekolah, sementara ketercukupan sarana dipengaruhi oleh kemampuan keuangan. Sebagai contoh bantuan yang pernah diterima, informan menyebut pengadaan sekitar 15 unit Chromebook dari pemerintah pusat yang masih dimanfaatkan. Keterangan tersebut menggambarkan adanya dukungan fasilitas di tengah kebutuhan pemeliharaan yang tetap harus ditanggung sekolah. Wawancara tidak memuat dokumen tentang target capaian, penjadwalan perbaikan, atau indikator kuantitatif yang digunakan untuk menilai penyelesaian setiap tindak lanjut, sehingga rincian pelaksanaan setelah rapat belum dapat dikaji lebih jauh.

4. Keterlibatan Komite Sekolah, Orang Tua, dan Yayasan

Setelah rangkaian evaluasi dilaksanakan, sekolah menggunakan forum musyawarah tahunan untuk menyampaikan capaian program dan menyusun arah kerja berikutnya. Menurut kepala sekolah, pertemuan tersebut melibatkan komite sekolah, orang tua peserta didik, guru, dan perwakilan yayasan melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Informasi hasil kegiatan satu tahun sebelumnya menjadi bagian dari bahan yang disampaikan, lalu dilanjutkan dengan pembahasan rencana pada periode selanjutnya. Keterlibatan orang tua terutama disalurkan melalui perwakilan komite sekolah.

Dalam kerangka yang dijelaskan informan, forum tersebut berfungsi sebagai tempat mengomunikasikan kebutuhan sekolah sekaligus menggalang kerja sama bagi pelaksanaan program. Yayasan mempunyai kedudukan penting karena penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan lembaga pengelola sekolah swasta. Sementara itu, komite menjembatani komunikasi dengan keluarga peserta didik. Tingkat partisipasi setiap pihak, frekuensi pemberian masukan, maupun pengaruh usulan mereka terhadap keputusan akhir tidak diukur secara tersendiri. Temuan yang dapat ditegaskan adalah tersedianya forum tahunan yang mempertemukan unsur internal dan eksternal sekolah.

5. Hambatan dalam Evaluasi dan Peningkatan Mutu

Kepala sekolah mengidentifikasi keterbatasan anggaran sebagai hambatan paling menonjol dalam menindaklanjuti kebutuhan peningkatan mutu. Sekolah swasta harus mengelola dana operasional yang dinilai belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan, khususnya pemeliharaan fasilitas dan pembayaran hak pendidik serta tenaga kependidikan. Informan menilai ketentuan penggunaan dana BOS semakin ketat, sehingga pengalokasiannya untuk kebutuhan tertentu tidak selalu luwes. Ia juga menggambarkan keadaan ketika pembayaran gaji pada satu periode menyerap dana yang tersedia dan menimbulkan kendala pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.

Dari sisi kontribusi masyarakat, informan menjelaskan adanya pembayaran infak atau uang bangunan yang bervariasi menurut kemampuan keluarga, yakni sekitar Rp80.000 sampai Rp150.000 per bulan, dengan pembebasan bagi sebagian peserta didik. Sekolah juga menerima murid tanpa pungutan dalam kaitannya dengan kebijakan penerimaan gratis yang dijelaskan informan. Sekitar 20 peserta didik disebut berasal dari perpindahan sebuah SMP negeri yang kapasitasnya telah terpenuhi. Dalam situasi itu, bantuan pengganti melalui BOS Daerah yang diharapkan sekolah dilaporkan belum diterima hingga tanggal wawancara. Informan mengemukakan adanya keberatan sebagian orang tua saat pembayaran tetap diminta sementara program sebelumnya dipahami sebagai layanan gratis.

Kesepakatan sementara yang diceritakan informan adalah pembayaran berjalan hingga bantuan pengganti diterima, kemudian dihentikan sesudah dana tersedia. Keterangan tersebut memperlihatkan tekanan antara kebutuhan membiayai operasional harian dan harapan orang tua terhadap kebijakan bebas pungutan. Jumlah penerimaan, status administrasi BOS Daerah, serta rincian penggunaan dana tidak diverifikasi melalui dokumen keuangan pada penelitian ini. Karena itu, uraian hambatan diperlakukan sebagai pengalaman pengelolaan yang disampaikan pimpinan sekolah, bukan sebagai penilaian terhadap kepatuhan anggaran atau kepastian kewajiban pihak tertentu.

6. Indikator Keberhasilan dan Persepsi tentang Pentingnya School Review

Menurut informan, keberhasilan program peningkatan mutu terutama dilihat dari kinerja pendidik dan hasil yang dicapai peserta didik. Ukuran yang disebut meliputi nilai akademik serta prestasi dari kegiatan pengembangan minat dan bakat. Sekolah menyelenggarakan sejumlah ekstrakurikuler, antara lain Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Tapak Suci, dan Hizbul Wathan. Kepala sekolah juga menjelaskan partisipasi siswa dalam perlombaan di luar sekolah, termasuk prestasi pada tingkat kota dan provinsi serta kesempatan mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional. Informasi itu menggambarkan ragam keluaran pendidikan yang dianggap bermakna oleh pimpinan sekolah.

School review dipandang penting karena dapat menunjukkan bagian program yang berhasil dan unsur yang masih perlu dibenahi. Informan mengilustrasikan manfaat evaluasi sebagai cara mengetahui kecenderungan kenaikan atau penurunan capaian. Pandangan tersebut menempatkan penilaian sebagai bahan pengambilan keputusan, bukan semata pelengkap arsip. Akan tetapi, wawancara tidak menyertakan seri data nilai, catatan pencapaian antarperiode, atau indikator terukur mengenai proses pengajaran untuk membuktikan kecenderungan tersebut. Karena itu, persepsi mengenai manfaat dan ukuran keberhasilan perlu dibaca sebagai pandangan pengelola sekolah yang menjelaskan orientasi evaluasinya.

Keenam tema tersebut dirangkum pada Tabel 1. Tabel ini mempertahankan pengelompokan aspek berdasarkan keterangan informan, sehingga dapat digunakan untuk menelusuri hubungan antara bentuk supervisi, partisipasi, tindak lanjut, dan hambatan peningkatan mutu.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Wawancara tentang Pelaksanaan *School Review*

Aspek	Temuan
Bentuk pelaksanaan	Supervisi internal oleh kepala sekolah dan supervisi eksternal oleh pengawas; istilah *school review* belum lazim digunakan.
Aspek yang dinilai	Kelengkapan administrasi sekolah (pelaporan berkala ke dinas, dana BOS, rapor pendidikan) dan administrasi guru (modul ajar) serta cara mengajar.
Pihak terlibat	Seluruh pemangku kepentingan sekolah: kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan.
Pemanfaatan hasil	Hasil instrumen supervisi dibahas dalam rapat kerja tahunan untuk evaluasi dan perencanaan; perbaikan disampaikan melalui instruksi kepada tiap bagian (guru, sarana prasarana, laboratorium).
Keterlibatan eksternal	Komite sekolah, orang tua peserta didik, yayasan/Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, dan guru diundang dalam rapat tahunan.
Hambatan	Keterbatasan anggaran sebagai sekolah swasta, dana BOS yang tidak mencukupi dan kaku, serta dana BOS Daerah untuk program sekolah gratis yang belum cair sehingga gaji pendidik tersendat.
Indikator keberhasilan	Kinerja pendidik, capaian nilai, dan prestasi nonakademik melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Persepsi	*School review* dinilai sangat penting sebagai alat ukur keberhasilan program dan penentu bagian yang perlu diperbaiki.

Pembahasan

1. Pemahaman dan Bentuk Pelaksanaan School Review

Perbedaan antara istilah yang digunakan informan dan konsep *school review* memperlihatkan bahwa evaluasi kelembagaan dapat tumbuh melalui praktik yang sudah akrab bagi sekolah. Supervisi internal serta eksternal menyediakan informasi mengenai pelaksanaan kewajiban dan kinerja pendidik. Akan tetapi, keduanya belum serta-merta membentuk evaluasi diri yang holistis. MacBeath (1999) menempatkan evaluasi diri sebagai kegiatan ketika sekolah mengembangkan kapasitas membaca kondisinya dengan bukti dan refleksi bersama. Oleh karena itu, penguatan *school review* tidak harus dimulai dengan meniadakan supervisi yang sudah berjalan, melainkan dengan mengintegrasikan hasilnya ke dalam pemetaan yang menjelaskan mutu pengelolaan, pembelajaran, dan pengalaman peserta didik secara lebih utuh.

Dalam kerangka penjaminan mutu, pemetaan keadaan perlu dipertemukan dengan tindakan pembaruan yang berulang (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016). Hal tersebut sejalan dengan temuan Meirani et al. (2022) mengenai persoalan implementasi penjaminan mutu yang melibatkan banyak bidang sekolah. Jika instrumen supervisi hanya dibaca sebagai daftar berkas yang lengkap atau belum lengkap, informasi tentang penyebab kesenjangan mutu dapat terabaikan. Sekolah dapat menggunakan praktik pemeriksaan yang telah tersedia sebagai titik awal dengan membedakan temuan administratif, kebutuhan pendampingan guru, dan masalah layanan yang berdampak terhadap peserta didik.

2. Aspek yang Dinilai dan Pihak yang Terlibat

Penekanan terhadap laporan berkala, dana BOS, rapor pendidikan, serta modul ajar menunjukkan perhatian sekolah pada keteraturan pengelolaan. Pemeriksaan seperti ini tetap mempunyai fungsi yang penting karena penyelenggaraan pendidikan memerlukan pertanggungjawaban dan konsistensi pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, dokumen yang tertata tidak selalu menerangkan bagaimana pembelajaran dialami dan dipahami peserta didik. Dewi (2020) mengingatkan adanya risiko ketika supervisi akademik terkonsentrasi pada pemeriksaan administrasi guru. Kurniawan et al. (2018) menempatkan kebutuhan, pelaksanaan, dan hasil program sebagai bagian yang saling berhubungan dalam penilaian supervisi. Berdasarkan keduanya, penelaahan perangkat pembelajaran semestinya dilengkapi dengan percakapan mengenai proses mengajar serta dukungan yang diperlukan pendidik.

Penguatan cakupan tidak berarti menambah indikator secara tidak terbatas. Sekolah justru perlu memilih ukuran yang bermakna, dapat dikumpulkan, dan mampu mengarahkan keputusan. Di samping kelengkapan perangkat, telaah atas keterlaksanaan pembelajaran, umpan balik peserta didik, kondisi fasilitas, dan keberlangsungan program akan membantu mengidentifikasi persoalan secara lebih proporsional. Apriyanto et al. (2024) memperlihatkan pentingnya menelaah kesenjangan komponen personel sekolah dalam penyelenggaraan program ramah anak. Pambudi dan Fajrin (2024) menunjukkan peran partisipasi keluarga dalam mendukung pelaksanaan program literasi di sekolah. Kedua kajian tersebut menegaskan bahwa mutu berkaitan dengan dimensi layanan serta keterlibatan pengguna pendidikan, bukan hanya kesesuaian berkas.

3. Pemanfaatan Hasil Review dan Tindak Lanjut Perbaikan

Pemanfaatan butir supervisi pada rapat kerja tahunan menjadi aspek yang bernilai dalam temuan penelitian. Sekolah telah memiliki jalur yang menghubungkan identifikasi kekurangan dengan penugasan kepada bidang terkait. Jalur tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan tidak seluruhnya berhenti pada pemeriksaan. Namun, pengelolaan tindak lanjut memerlukan lebih dari penyampaian instruksi. Sasaran yang jelas, tenggat yang masuk akal, pembagian kewenangan, dan ukuran kemajuan akan membantu sekolah membedakan pekerjaan yang sudah selesai dari kegiatan yang baru direncanakan. Torro et al. (2024) menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja sekolah secara kolaboratif dengan tujuan yang terarah, sedangkan Bunbaban et al. (2022) memperlihatkan nilai evaluasi program dalam menopang kepemimpinan serta pembaruan mutu.

Langkah lanjutan yang relevan ialah mengaitkan setiap temuan supervisi dengan kegiatan perbaikan yang realistis berdasarkan kapasitas sekolah. Contohnya, kebutuhan terkait perangkat ajar dapat dihubungkan dengan pembinaan atau forum berbagi praktik, sedangkan kerusakan peralatan perlu dicatat sebagai kebutuhan pemeliharaan dengan prioritas yang disepakati. Ini merupakan rekomendasi analitis, bukan uraian tentang prosedur yang telah dipastikan berlangsung. Penelitian Sopacuaperu et al. (2025) dan Pratiwi et al. (2023) mendukung pentingnya tahap tindak lanjut supervisi bagi penguatan kinerja guru. Apabila catatan perbaikan diperiksa kembali pada pertemuan berikutnya, sekolah akan memperoleh dasar yang lebih kuat untuk menilai apakah intervensi yang dipilih benar-benar menyelesaikan masalah.

4. Keterlibatan Komite Sekolah, Orang Tua, dan Yayasan

Forum musyawarah tahunan memberi peluang bagi berbagai pihak untuk mengetahui capaian sekolah dan memahami prioritas perbaikan. Bagi sekolah swasta, keterlibatan yayasan dan keluarga peserta didik mempunyai dimensi pengelolaan yang penting karena kesinambungan program dapat dipengaruhi dukungan kelembagaan maupun sosial. Hardiansyah (2022) menunjukkan bahwa partisipasi komite dan orang tua merupakan unsur penting manajemen berbasis sekolah. Islahuddin et al. (2024) memperlihatkan bahwa masyarakat dapat berkontribusi terhadap dukungan keuangan, fasilitas, dan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan. Dalam sudut pandang manajemen mutu, Sallis (2002) juga menegaskan bahwa kualitas menuntut orientasi pada kebutuhan para pihak yang berkepentingan dengan layanan.

Walaupun pelibatan melalui forum tahunan telah diceritakan, intensitas dan kedalaman kontribusinya belum diketahui dari satu wawancara. Kehadiran dalam pertemuan tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengusulkan agenda atau menilai hasil program. Temuan ini membuka kebutuhan penguatan ruang dialog yang lebih terdokumentasi, misalnya melalui

pencatatan masukan, keputusan bersama, dan pelaporan perkembangan tindak lanjut. Penelitian Nasikhah et al. (2024) menautkan strategi penjaminan mutu dengan terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi mengenai apa yang dapat dan belum dapat dilaksanakan merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan yang konstruktif antara sekolah dan para pemangku kepentingan.

5. Hambatan dalam Evaluasi dan Peningkatan Mutu

Kesulitan pendanaan menempatkan *school review* dalam hubungan yang erat dengan kapasitas institusi untuk bertindak. Penilaian dapat menunjukkan kebutuhan perbaikan, tetapi keputusan operasional harus mempertimbangkan ketersediaan dana yang dapat digunakan sesuai ketentuan. Kondisi yang diuraikan informan mencakup pembiayaan gaji, pemeliharaan sarana, penerimaan dari keluarga peserta didik, serta ketidakpastian bantuan pengganti yang diharapkan. Keterbatasan seperti ini juga ditemukan Khoiroh (2019) pada tindak lanjut evaluasi diri sekolah. Kramer dan Wibowo (2024) menjelaskan bahwa ketergantungan pada dana operasional yang terbatas dapat mempersempit ruang pengembangan sekolah, sedangkan Pantas dan Fitriana (2024) menyoroti perlunya penilaian efektivitas kebijakan pembiayaan berdasarkan dampaknya.

Wawancara memperlihatkan adanya ketegangan antara harapan terhadap layanan tanpa pungutan dan kebutuhan sekolah menutup biaya operasional sebelum bantuan daerah diterima. Keadaan tersebut patut dipahami sebagai pengalaman yang dilaporkan informan, bukan dasar untuk menyimpulkan terdapat kesalahan hukum atau administrasi pada pihak tertentu. Penilaian yang lebih tegas membutuhkan dokumen anggaran, jadwal penyaluran, ketentuan kebijakan, serta perspektif pengelola dana dan orang tua. Bagi agenda mutu, pelajaran yang dapat diambil adalah perlunya membedakan program perbaikan yang dapat segera dilakukan dengan dukungan yang tersedia dan program yang bergantung pada kepastian pembiayaan. Penyusunan urutan kebutuhan secara transparan dapat membantu sekolah mempertahankan layanan inti sekaligus menjelaskan kepada warga sekolah mengapa sebagian program harus dijalankan bertahap.

6. Indikator Keberhasilan dan Persepsi tentang Pentingnya School Review

Prestasi akademik dan nonakademik merupakan informasi yang berguna untuk membaca sebagian hasil penyelenggaraan pendidikan. Aktivitas IPM, Tapak Suci, dan Hizbul Wathan juga menunjukkan bahwa sekolah memaknai pendidikan melalui jalur pembelajaran serta pengembangan karakter dan kegiatan peserta didik. Namun, prestasi tertentu tidak selalu merepresentasikan pengalaman seluruh siswa. Indikator keluaran perlu dibaca bersama indikator proses agar perbaikan mutu tidak hanya diarahkan pada capaian akhir. Alamsyah (2015) menghubungkan evaluasi diri dengan mutu pembelajaran dan kinerja guru, sedangkan Widiyan dan Takayoshi (2024) menyoroti pentingnya dukungan kepala sekolah bagi pengembangan profesional pendidik. Dengan demikian, penilaian prestasi menjadi lebih bermakna apabila dipadukan dengan pemantauan kualitas pembelajaran yang mendorong capaian tersebut.

Persepsi kepala sekolah bahwa evaluasi membantu mengetahui kecenderungan capaian merupakan landasan kepemimpinan yang konstruktif. Akan tetapi, kemampuan menyatakan bahwa mutu meningkat atau menurun memerlukan pembandingan bukti yang konsisten antarkurun waktu. Kajian Restiani et al. (2024) menempatkan kepemimpinan transformasional dalam hubungan dengan kondisi kerja guru, sementara Salupra dan Sujarwo (2024) membahas pentingnya pengelolaan sumber daya manusia pada satuan pendidikan dasar. Kedua kajian tersebut membantu menegaskan bahwa hasil pembelajaran juga terkait dengan dukungan kelembagaan terhadap pendidik. Dalam konteks penelitian ini, pandangan informan dapat menjadi dasar usulan untuk menyatukan informasi mengenai pembelajaran, kondisi kerja, fasilitas, dan capaian peserta didik sehingga prioritas sekolah tidak ditentukan hanya oleh indikator yang paling mudah diamati.

Secara keseluruhan, temuan memperlihatkan embrio siklus evaluasi yang bergerak dari supervisi menuju pembahasan dan penugasan tindak lanjut. Kekuatan paling nyata terletak pada keberadaan mekanisme pengawasan, pemanfaatan hasil dalam rapat tahunan, dan keterbukaan forum kepada beberapa unsur sekolah. Di sisi lain, keterbatasan yang masih tampak adalah dominasi ukuran administratif, belum jelasnya target perbaikan yang terdokumentasi, serta tekanan anggaran. Kesimpulan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional karena diperoleh melalui perspektif seorang kepala sekolah. Penelitian lanjutan yang melibatkan guru, pengawas, komite, dan orang tua serta dokumen hasil supervisi dapat memeriksa kesesuaian penjelasan antaraktor dan menilai efektivitas tindak lanjut secara lebih mendalam.

SIMPULAN

Pelaksanaan *school review* di SMP Muhammadiyah 12 Makassar tercermin melalui supervisi internal oleh kepala sekolah dan supervisi eksternal oleh pengawas. Penilaian yang diceritakan informan berfokus pada administrasi kelembagaan, perangkat ajar, dan praktik pengajaran. Hasil pemeriksaan digunakan dalam rapat kerja tahunan untuk membahas capaian serta merancang langkah perbaikan pada bidang pembelajaran, sarana, dan laboratorium. Sekolah juga melibatkan komite, orang tua, guru, dan yayasan melalui forum musyawarah. Dengan demikian, mekanisme pengawasan telah memberikan bahan bagi pengambilan keputusan, meskipun belum menunjukkan pelaksanaan evaluasi diri yang sepenuhnya terintegrasi.

Hambatan yang paling menonjol berkaitan dengan keterbatasan dana operasional, kebutuhan pemeliharaan, serta ketidakpastian bantuan pembiayaan yang diharapkan sekolah. Di sisi pengukuran mutu, keberhasilan masih terutama dikaitkan dengan kinerja pendidik dan prestasi peserta didik. Penguatan evaluasi dapat diarahkan pada penggunaan indikator proses dan hasil yang lebih seimbang, pencatatan target serta tindak lanjut, dan komunikasi terbuka mengenai prioritas yang dapat dibiayai. Temuan ini menggambarkan perspektif kepala sekolah sebagai informan tunggal. Oleh sebab itu, kajian berikutnya perlu memperluas sumber informasi dan memeriksa dokumen pendukung agar proses, partisipasi, dan dampak perbaikan mutu dapat dinilai secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, D. W. (2015). *Analisis Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Hubungannya dengan Kinerja Guru dan Mutu Pembelajaran* [Universitas Pendidikan Indonesia]. https://repository.upi.edu/20385

Apriyanto, R. E., Suszanty, N. T. W., Khamid, M., & Jabar, C. S. A. (2024). Analysis Study of the Gaps in Elementary School Personnel Components in Implementing Child-friendly School Programs. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(2), 38–51. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.71761

Bunbaban, Y. S., Iriani, A., & Waruwu, M. (2022). Evaluasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan Menggunakan Model CIPP. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *9*(2), 223–237. https://doi.org/10.24246/j.jk.2022.v9.i2.p223-237

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Dewi, A. P. (2020). Pengelolaan Supervisi Akademik Sekolah Dasar Islam Terpadu Ash-Haabul Kahfi Lubuk Alung. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *7*(1), 56–64. https://doi.org/10.24246/j.jk.2020.v7.i1.p56-64

Hardiansyah, F. (2022). The Implementation of School-based Management in Improving Quality of Education in Primary School. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *9*(2), 148–162. https://doi.org/10.24246/j.jk.2022.v9.i2.p148-162

Islahuddin, Rahman, A., & Habiburrahman, S. (2024). The Role of Local Communities in Supporting Madrasah Management: a Comparative Study between Indonesia and Thailand. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(2), 81–88. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.81766

Khoiroh, M. (2019). *Implementasi Evaluasi Diri Sekolah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan di SD Islam Al-Raudlatul Amien (SD Irada) Gresik* [UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/33005/

Kramer, P., & Wibowo, U. B. (2024). Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Kecil di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(2), 68–80. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.77182

Kurniawan, D., Dwikurnaningsih, Y., & Sulasmono, B. S. (2018). Evaluasi Program Supervisi Akademik di PAUD Swasta. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *5*(2), 107–123. https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i2.p107-123

MacBeath, J. (1999). *Schools Must Speak for Themselves: the Case for School Self-evaluation*. Routledge.

Meirani, R. K., Sobri, A. Y., & Sunarni. (2022). Analisis Permasalahan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (studi Kasus di SMK Cor Jesu Malang). *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *9*(2), 203–211. https://doi.org/10.24246/j.jk.2022.v9.i2.p203-211

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nasikhah, W. R., Sultoni, & Rochmawati. (2024). Quality Assurance Strategy in Maintaining School Integrity and Community Trust to Strengthen the Foundations of Education Quality. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(2), 17–26. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.73542

Pambudi, H. A., & Fajrin, H. O. (2024). A School Literacy Program and Parental Role in Enhancing Students' Literacy. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(1), 115–125. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i1.72864

Pantas, P. E., & Fitriana, D. (2024). From Allocation to Impact: Evaluating the Effectiveness of School Budget Models in Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(2), 89–96. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.81829

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (2016).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (2021).

Pratiwi, H. I., Windyaningsiwi, R., Rusilowati, A., & Astuti, B. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Akademik di MTs Plus Sabilunnajah Bojonegoro. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *10*(2), 166–173. https://doi.org/10.24246/j.jk.2023.v10.i2.p166-173

Restiani, B., Hariri, H., & Rini, R. (2024). The Effect of Principal Transformational Leadership on Teacher Job Satisfaction: a Literature Review. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(2), 27–37. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.77007

Sallis, E. (2002). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). Kogan Page.

Salupra, F., & Sujarwo. (2024). Human Resources Management at Charitas Nandan Elementary School and Mangunan Experimental Elementary School in Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(2), 52–67. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.77153

Sopacuaperu, A., Repelita, T., Akmal, M. I., & Danajaya, M. A. S. A. (2025). Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Tingkat Sekolah Dasar. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *12*(1), 59–72. https://doi.org/10.24246/j.jk.2025.v12.i1.p59-72

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Torro, S., Manda, D., Ridha, R., Patahuddin, & Darmayanti, D. P. (2024). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah Bagi Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah di Kabupaten Polman Sulawesi Barat. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 240–253. https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i2.252

Widiyan, A. P., & Takayoshi, M. (2024). School Principals' Support for Teachers' Professional Development in Indonesia and Japan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *12*(2), 108–117. https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.78882